

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH LPPD 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banjarbaru Tahun 2021 berhasil diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan komunikasi informasi dan persandian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan, dalam kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang kritis dan dinamis, setiap perangkat daerah harus bisa menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan pencapaian sesuai target yang direncanakan. LKIP 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banjarbaru pada tahun 2021.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, dan hal tersebut akan senantiasa diupayakan lebih baik lagi pencapaiannya di tahun-tahun mendatang.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini , semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen LKIP ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarbaru, Januari 2022
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,**

IWAN HERMAWAN, S.Hut, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710209 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4 Aspek Strategi Organisasi.....	6
1.5 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	6
1.6 Keuangan	10
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Strategi Dan Kebijakan	17
2.3 Perjanjian Kinerja 2021	21
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2021	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.....	28
Sasaran 2 : Meningkatkan Informasi Publikss	36
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	44
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	49
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Langkah Di Masa Yang Akan Datang	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Akhir Tahun 2021.....	5
Tabel 1. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD.....	10
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	14
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	16
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.....	22
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.....	23
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran	25
Tabel 3. 1 Realisasi Kinerja Berdasarkan Renstra 2016-2021.....	27
Tabel 3. 2 Indikator Aspek SPBE Diskominfo Kota Banjarbaru.....	29
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi 2021	30
Tabel 3. 4 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator	30
Tabel 3. 5 Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan 2019	31
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMD dan Nasional.....	32
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi	32
Tabel 3. 8 Perbandingan dengan Kabupaten/Kota.....	32
Tabel 3. 9 Realisaasi Anggaran.....	35
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi 2021	37
Tabel 3. 11 Media yang Menyebarkan Informasi Publik Pemerintah Daerah	37
Tabel 3. 12 Media Youtube	38
Tabel 3. 13 Media Instagram	38
Tabel 3. 14 Twiter.....	39
Tabel 3. 15 Media Facebook.....	39
Tabel 3. 16 Banjarbaru TV	40
Tabel 3. 17 Perbandingan Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021	40
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional	41
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi	41
Tabel 3. 20 Perbandingan Kinerja dengan Kab/Kota Sekitar	41
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran	43
Tabel 3. 22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	44

Tabel 3. 23 Daftar SKPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral	44
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021	45
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan RPJMD dan Nasional	46
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi	46
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota Sekitar	47
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran	48
Tabel 3. 29 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	50
Tabel 3. 30 Perbandingan Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021	52
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan RPJMD dan Nasional	52
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi	53
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Kab/Kota Sekitar	53
Tabel 3. 34 Tabel Realisasi Anggaran	55
Tabel 4. 1 Tabel Capaian Kinerja	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	5
Gambar 3. 1 Indeks Kematangan Keamanan Informasi Tahun 2021	51
Gambar 3. 2 Tingkat Penerapan Pengamanan	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan misi keempat pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yaitu “melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”. Sesuai Dengan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan yang disebut dengan *electronic government*. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government* sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna

terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government).

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru NOMOR 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

B. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 tahun 2016 menyebutkan, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu :

- **Tugas Pokok :**

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Informatika dan Bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian ;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informasi publik serta Informatika;
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi publik serta informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahi :
 - 1. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi
 - d. Bidang Informatika membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Pengembangan Web Pemerintah Daerah
 - 3. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - 1. Seksi Statistik
 - 2. Seksi Persandian
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Keadaan Pegawai

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Iwan Hermawan, S.hut, MM	Pembina Tk.I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas	S-2
2	Kusnadi, S.Sos, MAP			
3	Najmah Sri Agustinah, S.Sos	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S-1
4	Helfizah Ristyaty, SE	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
5	Widyarti, SE	Penata (III/c)	Pengelola Bahan Perencanaan	S-1
6	Naryati, A.Md	Penata (III/c)	Pengadministrasi Kepegawaian	D-3
7	Gusti Ayu Tri Yuharti, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1
8	Wiwiek Pangestu Rahayu	Pengatur Tk.I (II/d)	Verifikator Keuangan	SMA
9	Fatimah	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	SMU
10	Naomi	Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	SMK

11	Ashari Murti	Pengatur (II/c)	Pramu Bakti	SMA
11	Maya Pramita Islamy, S.Sos	-	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	S-1
13	Dewi Sartika Fauzi, ST	-	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan	S-1
14	Framitha Dwi Andany, S.Hut	-	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	S-1
15	Marshenda Nur Ariyati	-	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	SMU
Bidang Komunikasi dan Informasi				
2	Herry Isdaryoko, S.AP	Penata Tk.I (III/d)	Kabid	S-1
	Denni Herriadi, S.Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	S-1
	Fada Betha Maharani, SH	Penata (III/c)		S-1
4	Titiek Septiningsih, S.Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Komputer Pertama	S-1
5	Tedy Yusuf Priatna, A.Md	Penata Muda (III/a)	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	D-3
6	Nazuarni	Pengatur (II/c)	Pengelola Dokumentasi	MA
7	Gusti Faisal Rakhman	-	Staf Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	SMA
8	Muhammad Rizky Destian Ridhani, S.Ds	-	Staf Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik	S-1
Bidang Informatika				
1	Khairurrijaal, S.STP	Pembina (IV/a)	Kabid Informatika	D-IV
2	Adi Cipta Cahyadi Putra Anugerah, S.STP	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	D-IV
3	Wijaya Kesuma, S.Kom	Penata (III/c)	Kasi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	S-1
4	Teddy Endar	Penata (III/c)	Kasi Pengelolaan Jaringan	S-1

	Sukmana, ST		Komunikasi Data	
5	Husnul Khatimah, S.Kom	Penata (III/c)	Pranata Komputer Muda	S-1
6	Reza Muttaqien, S.Kom	Penata (III/c)	Pranata Komputer Muda	S-1
7	Nor Amalia, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D-3
8	Muhammad Fajar Rizwanna, S.Kom	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Pertama	S-1
9	Fikri Haryadi, A.Md	Penata Muda (III/a)	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	D-3
10	Aly Saifullah, ST	-	Staf Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	S-1
11	Muh. Ary Surakhman, ST	-	Staf Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	S-1
12	Sigit Suhartono, A.Md	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	D-3
13	Nor Azizah, S.Kom	-	Staf Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	S-1
14	Tuti Mardiana, SE	-	Staf Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	S-1
15	Wahyu Indraman Akman	-	Staf Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	SMA
16	M.Ridha Rahimi, S.Kom	-	Staf Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	S-1
17	M.Ginanjari	-	Staf Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Website Pemerintahan	SMK
18				
19				
Bidang Statistik dan Persandian				
1	Drs. Krisman	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Statistik dan Persandian	S-1
2	Syahirati Fibri	Penata Tk.I	Kasi Persandian	S-1

	Andina, S.Kom	(III/d)		
3	Erlina Apriyanti, S.Si	Penata (III/c)	Kasi Statistik	S-1
4	Theresia Rieka Budiarti, S.Kom	Penata (III/c)	Pengelola Data Statistik	S-1
5	Helmi, S.Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pranata Komputer Pertama	S-1
6	Haryono	Penata Muda (III/a)	Operator Sandi dan Telekomunikasi	SMEA
7	Amin Rawa, A.Md	-	Staf Seksi Persandian	D-3
8	Djaka Umbara Wurung, S.Kom	-	Staf Seksi Persandian	S-1
9	Mecca Maulivia Azza, S.Kom	-	Staf Seksi Persandian	S-1

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

A. Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)”.

Penjelasan dari Visi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- Terwujudnya pelayanan publik yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) adalah terciptanya pelayanan publik di Kota Banjarbaru berbasis elektronik menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga memudahkan masyarakat.
- TIK yang Harat (handal, aman, responsif dan terintegrasi) adalah teknologi yang digunakan adalah handal yang kekinian, aman sesuai standar yang ditetapkan, responsif terhadap perkembangan jaman dan terintegrasi (terhubung antara SKPD satu dengan yang lain) sehingga jadi efektif dan efisien.

MISI SKPD

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik
- 2) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jaringan
- 3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

B. Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika , yaitu;

- Tujuan : Terlaksananya Reformasi Birokrasi
- Sasaran :
 1. Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government
 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi

C. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan SKPD, adapun strategi dan kebijakan SKPD yaitu :

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD
3.	Membangun citra positif Kota Banjarbaru di media informasi	Pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pelayanan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas	Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan
5.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya infrastruktur

		Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet	Teknologi Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--------------------------------------

D. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika Kota Banjarbaru sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

1) Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

Capaian program : Prosentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Diskominfo

1.1 Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah

Output : Terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap jaringan internet dan intranet

Outcome : Meningkatnya kualitas jaringan internet dan intranet

1.2 Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK

Output : Terselenggaranya konektivitas antar SKPD

Outcome : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan data TIK

1.3 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi

Output : Tim SPBE, Notebook Graphics, Komputer Graphics, RAM Highend, Power Supply Highend, Harddisk SSD, Printer, VGA Highend dan Aplikasi

Outcome : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & Suplemen

2) Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Capaian program : Persentase Tindaklanjut Atas Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online Sesuai Waktu Yang Ditetapkan

2.1 Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat

- Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi
Outcome : Terlaksananya pemantauan isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
Impact : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran inspirasi, pendapat dan aduannya

3) Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Capaian program : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik

3.1 Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik

Output : Terpenuhinya fasilitas sumber daya komunikasi publik

Outcome : Terlaksananya sosialisasi dan Terbentuknya KIM

3.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik

Output : Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik melalui media informasi

Outcome : Terlaksananya sosialisasi media pencapaian opini publik

3.3 Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Output : Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi publik dan jumlah informasi PPID yang diupload ke aplikasi

Outcome : Tersedianya akses informasi publik

Impact : Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan permintaan informasi publik.

4) Program Pengembangan Data / Informasi

Capaian program : Persentase Penyajian Informasi Publik Khususnya Data Statistik Sektor

4.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

Output : Buku statistik Kota Banjarbaru & Penyusunan buku 8 kelompok data penting pembangunan

Outcome : Jumlah data statistik Kota Banjarbaru yang terupdate dan terdistribusi

4.2 Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Output : Buku Indikator Makro

Outcome : Jumlah data hasil pengolahan data informasi
pembangunan ekonomi

5) Program Pengembangan Persandian Nasional

Capaian program : Prosentase Pemenuhan Indikator Keamanan
Informasi Kepala Daerah dan Diskominfo
sesuai ISO 27001

5.1 Pembinaan Penyelenggaraan Persandian

Output : Tersedianya tata kelola penyelenggaraan
persandian

Outcome : Terlaksananya pembinaan persandian

5.2 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian

Output : Tersedianya peraturan perundang - undangan
bidang persandian

Outcome : Terlaksananya monitoring pengamanan informasi
elektronik.

6) Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

Capaian program : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Menggunakan TIK

6.1 Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan
Kegiatan Pemerinta Kabupaten / Kota

Output : Jumlah SKPD yang terlayani dalam pelayanan
publik

Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan penyelenggaraan
pemerintah

6.2 Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama
Domain, Sub Domain serta Website dan konten

Output : Evaluasi Perwali sistem pemerintahan berbasis
elektronik

Outcome : Persentase aplikasi yang digunakan dalam SPBE

7) Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

Capaian program : Prosentase Penyelenggaraan Pelatihan TIK

7.1 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

Output : Terselenggaranya kegiatan pelatihan, sosialisasi dan Smart City

Outcome : Terlaksananya pelatihan TIK

Sedangkan untuk belanja langsung Non Urusan, maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya jasa listrik, air, telepon dan internet

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.2. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.3. Penyediaan alat tulis kantor

Output : Tersedianya alat tulis kantor

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.7. Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah
luar provinsi & dalam provinsi serta tersedianya
biaya kontribusi pelatihan / workshop / sosialisasi /
bimtek

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

1.9 Penyediaan Jasa Non PNS

Output : Tersedianya honorarium jasa Non PNS

Outcome : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian program : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana
Aparatur

2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam
kondisi baik

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
sesuai kebutuhan

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Output : Tersedianya BBM, jasa service, suku cadang dan
perpanjangan STNK

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
sesuai kebutuhan

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output : Tersedianya BBM, jasa service, bahan pelumas,
suku cadang dan perpanjangan STNK/BPKB

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
sesuai kebutuhan

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output : Tersedianya perawatan AC, TV dan Genset

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
sesuai kebutuhan

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Output : Tersedianya perawatan peralatan gedung kantor

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan

2.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Output : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan

3. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian program : - Cakupan laporan kinerja dan keuangan
- Presantase tertib administrasi barang/aset daerah

3.1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Output : Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan

Outcome : Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

Output : Jumlah laporan inventaris barang/aset tepat waktu

Outcome : Terpenuhinya sistem tertib administrasi barang/aset daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Sekretariat

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 9) Penyediaan Jasa Non PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- 2) Perencanaan dan Pelaporan manajemen Aset/Barang

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran 81,03%

- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi anggaran 100%
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi anggaran 99,81%.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi anggaran 100%
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran 98,74%
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan dengan realisasi anggaran 87,50%
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran 99,68%
- 8) Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran 97,98%
- 9) Penyediaan Jasa Non PNS dengan realisasi anggaran 100%
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran 99,47%
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan realisasi anggaran 93,91%
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opearsional dengan realisasi anggaran 79,88%
 - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran 99,33%
 - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi anggaran 82,49%
 - 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan realisasi anggaran 99,35%
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan realisasi anggaran 98,83%
 - 2) Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang dengan realisasi anggaran 77,55%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 313.963.300	Rp 254.394.245	Rp 59.569.055	81,03%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp -	100,00%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 24.178.500	Rp 24.132.500	Rp 46.000	99,81%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.871.000	Rp 25.871.000	Rp -	100,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 19.995.500	Rp 19.743.500	Rp 252.000	98,74%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.936.000	Rp 1.694.000	Rp 242.000	87,50%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 40.054.000	Rp 39.924.000	Rp 130.000	99,68%	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 25.764.200	Rp 25.244.332	Rp 519.868	97,98%	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Rp 392.640.000	Rp 392.640.000	Rp -	100,00%	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 79.620.000	Rp 79.200.000	Rp 420.000	99,47%	99,47%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan	Rp 23.525.000	Rp 22.092.300	Rp 1.432.700	93,91%	
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 49.434.000	Rp 39.486.300	Rp 9.947.700	79,88%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 34.326.020	Rp 33.066.050	Rp 1.259.970	96,33%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 21.700.000	Rp 17.900.000	Rp 3.800.000	82,49%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 649.280.000	Rp 645.035.000	Rp 4.245.000	99,35%	99,35%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN					
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp 35.512.750	Rp 35.098.650	Rp 414.100	98,83%	
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Rp 7.999.800	Rp 6.204.000	Rp 1.795.800	77,55%	

B. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

1. Program dan Kegiatan

a. **Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah**

- 1) Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat

b. **Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**

- 1) Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik
- 2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
- 3) Pelayanan Permintaan Informasi Publik

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a) Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

- 1) Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat dengan realisasi anggaran 90,36%

b) Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

- 1) Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 99,34%
- 2) Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran 99,92%
- 3) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dengan realisasi anggaran 86,33%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	PROGRAM LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH					
	Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 162.432.000	Rp 146.772.000	Rp 15.660.000	90,36%	-
2	PROGRAM LAYANAN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH					
	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 216.234.000	Rp 214.812.199	Rp 1.421.801	99,34%	-
	Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunkikasi Publik	Rp 41.964.000	Rp 41.929.000	Rp 35.000	99,92%	
	Pelayanan Permintaan Informasi Publik	Rp 102.015.000	Rp 88.065.000	Rp 13.950.000	86,33%	

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik yaitu :
 - a. Terlaksananya kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online
 - b. terlaksananya pembentukan KIM
 - c. terfasilitasinya Tim Lapor
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sudah cukup.
6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang komunikasi dan informasi publik, yaitu :

 - a) Kegiatan Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
 - 1) Permasalahan

Beberapa pejabat penghubung menanggapi laporan masih sekedar formalitas, tidak disertai dengan dokumentasi sebelum atau sesudah laporan setelah ditanggapi.
 - 2) Solusi

Mengingatkan pejabat penghubung agar selalu melampirkan dokumentasi hasil tindak lanjut laporan.
 - b) Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 1) Permasalahan
 - ✓ Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Kelompok Informasi Masyarakat masih kurang baik di kalangan remaja maupun golongan masyarakat yang sudah tua.
 - ✓ Masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana bagi keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat.
 - 2) Solusi
 - ✓ Menjalin kerjasama dengan SKPD atau instansi terkait agar memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di setiap kelurahan.
 - ✓ Meningkatkan partisipasi dan peran dari Kelompok Informasi Masyarakat, sehingga sebagian masyarakat mengetahui tentang program dan pembangunan di tingkat Kota

Banjarbaru.

- c) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
 - 1) Permasalahan
 - ✓ Pengetahuan masyarakat tentang penyebaran informasi masih kurang baik dan cenderung informasi yang diterima tidak dipilah atau ditelaah dulu kebenarannya.
 - ✓ Dengan sarana komunikasi yang ada masyarakat lebih cepat menerima informasi dari berbagai media yang ada.
 - 2) Solusi
 - ✓ Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan guna menangkul penyebaran berita yang tidak benar atau HOAK.
 - ✓ Melalui media komunikasi yang ada terus disampaikan tentang pentingnya BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL.
- d) Kegiatan Pelayanan Permintaan Informasi Publik
 - 1) Permasalahan

Admin SIP - PPID pada unit kerja masih ada yang tidak mengupload data ke aplikasi sehingga target kinerja 100% tidak dapat tercapai.
 - 2) Solusi

PPID Utama mensupport PPID Pembantu pada unit kerja untuk mendorong admin di unit kerja agar melaksanakan tugasnya, sekaligus menginstruksikan kepala bidang/seksi/subbag agar menyediakan informasi yang akan diupload oleh admin karena admin tidak bisa melaksanakan tugasnya bila informasi tidak tersedia.

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

C. Urusan Pemerintahan Bidang Informatika

1. Program dan Kegiatan

a. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- 1) Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah
- 2) Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
- 3) Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi

b. Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah

- 1) Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota
- 2) Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten

c. Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- 1) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a) Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK

- 1) Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran 97,66%
- 2) Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK dengan realisasi anggaran 87,03%
- 3) Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi dengan realisasi anggaran 90,94%

- b) Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
 - 1) Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran 85,24%
 - 2) Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev Di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten dengan realisasi anggaran 99,36%
- c) Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
 - 1) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan realisasi anggaran 69,77%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	PROGRAM LAYANAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH					
	Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	Rp 1.700.576.500	Rp 1.660.755.694	Rp 39.820.806	97,66%	100,00%
	Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	Rp 5.721.501.900	Rp 4.979.486.648	Rp 742.015.252	87,03%	-
	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan	Rp 57.976.000	Rp 52.726.000	Rp 5.250.000	90,94%	-
2	PROGRAM LAYANAN PENJAMINAN KEDAULATAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH					
	Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp 106.114.000	Rp 90.454.000	Rp 15.660.000	85,24%	
	Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten	Rp 32.969.000	Rp 32.759.000	Rp 210.000	99,36%	
3	PROGRAM LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMANFAATAN TIK					
	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Rp 129.365.000	Rp 90.260.000	Rp 39.105.000	69,77%	-

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Informatika, yaitu :
 - a. Terpasangnya infrastruktur jaringan fiber optik dan perangkat pendukung yang menghubungkan 20 (dua puluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
 - b. Tersusunnya Master Plan TIK Kota Banjarbaru sebagai acuan pengembangan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banjarbaru minimal 5 (lima) tahun ke depan.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan pada Bidang Informatika sudah baik.
6. Permasalahan dan Solusi
 - Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang informatika, yaitu :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
 - 1) Permasalahan
Pelaksanaan lelang terlambat karena perlu waktu untuk melaksanakan persiapan proses pemilihan dikarenakan perubahan harga pasar (fluktuasi harga tukar dolar).
 - 2) Solusi
Melakukan survey ulang harga untuk mempercepat penyusunan HPS.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi
 - 1) Permasalahan
Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait sehingga anggaran yang terserap tidak maksimal.
 - 2) Solusi
Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tentang pengembangan aplikasi yang akan dibuat maupun yang akan dilaksanakan melalui pihak ketiga berupa pengadaan ataupun belanja modal.

c) Kegiatan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota

1) Permasalahan

- ✓ Masih kurangnya kemampuan SDM pengelola SPSE dalam mengikuti perkembangan aplikasi SPSE yang terus diupdate oleh LKPP RI.
- ✓ Masih kurangnya kemampuan SDM dalam mengelola server dan keamanan jaringannya.
- ✓ Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang dalam mempertahankan 17 Standarisasi SPSE yang telah dicapai, karena apabila dalam monitoring LKPP RI terdapat hal yang tidak memenuhi standarisasi maka status 17 standarisasi SPSE tersebut akan dicabut.
- ✓ LPSE yang telah memenuhi standarisasi LPSE selanjutnya diharapkan untuk dapat mencapai ISO 27001:2013.
- ✓ Belum adanya aplikasi pendukung SPSE untuk monitoring real time dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2) Solusi

- ✓ Mengikuti bimbingan teknis SPSE yang diadakan oleh LKPP RI untuk pengelola LPSE.
- ✓ Mengikuti pelatihan Linux dan keamanan jaringan yang diadakan LKPP RI atau lembaga pelatihan lainnya.
- ✓ Membenahi sarana dan prasarana LPSE Kota Banjarbaru dalam pemenuhan 17 Standarisasi LPSE yang sudah tercapai.
- ✓ Perlunya penganggaran dana untuk pemenuhan ISO 27001:2013.
- ✓ Pembuatan aplikasi pendukung SPSE untuk monitoring dan evaluasi.

d) Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten

1) Permasalahan

- Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait sehingga anggaran yang diserap kurang maksimal.

2) Solusi

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang nama domain, sub domain serta website dan konten dapat maksimal.

e) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

1) Permasalahan

Kurangnya koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

2) Solusi

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait dalam hal promosi dan sosialisasi kegiatan baik dalam hal penjadwalan kegiatan dan pembentukan tim serta penunjang lainnya.

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

D. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Persandian

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data / Informasi

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi

2) Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

b. Program Pengembangan Persandian Nasional

1) Pembinaan Penyelenggaraan Persandian

2) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian.

2. Tingkat Capaian

Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang statistik dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru , yaitu :

a) Program Pengembangan Data/Informasi

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan dengan realisasi anggaran 100%

2) Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan realisasi anggaran 100%

- b) Program Pengembangan Persandian Nasional
 - 1) Pembinaan Penyelenggaraan Persandian dengan realisasi anggaran 67,27%
 - 2) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian dengan realisasi anggaran 98,68%

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Presantase (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI					
	Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Rp 81.870.500	Rp 81.870.500	Rp -	100,00%	
	Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 58.991.000	Rp 5.899.100	Rp 53.091.900	10,00%	-
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL					
	Pembinaan Penyelenggaraan Persandian	Rp 26.230.500	Rp 17.644.500	Rp 8.586.000	67,27%	-
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian	Rp 9.516.500	Rp 9.390.500	Rp 126.000	98,68%	-

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Statistik dan Persandian, yaitu :
 - a. Terlaksananya pembuatan Buku statistik Kota Banjarbaru
 - b. Terlaksananya pembuatan Booklet selang pandang Kota Banjarbaru
 - c. Terlaksananya pembuatan Leaflet Kota Banjarbaru
 - d. Terlaksananya pembuatan CD profil Kota Banjarbaru
 - e. Terlaksananya pembuatan buku indikator makro
5. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang menjadi kendala serta solusi pada bidang statistik dan persandian, yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

- 1) Permasalahan

- ✓ Data - data sektoral yang diperoleh dari produsen data / SKPD lambat, kurang akurat sering berubah - ubah dan tidak lengkap.
- ✓ Pengumpulan data statistik sektoral masih dilaksanakan secara manual (excel), belum didukung secara aplikasi sehingga pengelolaan data sektoral memerlukan waktu yang cukup lama.
- ✓ Masih minimnya jumlah dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan data statistik sektoral sehingga masih mengandalkan tenaga ahli dari BPS yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar.

- 2) Solusi

- ✓ Perlu dibuat aplikasi / portal data sebagai media pengumpulan data - data sektoral / SKPD.
- ✓ Perlu penambahan SDM yang memenuhi kualifikasi di bidang statistik.
- ✓ Mengikuti program peltihan - pelatihan terkait pengelolaan data statistik.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan perlunya dukungan pemangku kebijakan untuk mendorong SKPD

berperan aktif dalam memberikan data / informasi.

b) Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Permasalahan

- ✓ Data - data sektoral yang disampaikan oleh produsen data / SKPD sering tidak sesuai tenggat waktu yang diberikan / lambat dan elemen data yang diminta tidak terisi secara lengkap.
- ✓ Pengumpulan data statistik sektoral masih dilaksanakan secara manual (excel), belum didukung secara aplikasi sehingga pengelolaan data sektoral memerlukan waktu yang cukup lama.
- ✓ Masih minimnya jumlah dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan data statistik sektoral sehingga masih mengandalkan tenaga ahli dari BPS yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar.

2) Solusi

- ✓ Perlu dibuat aplikasi / portal data sebagai media pengumpulan data - data sektoral / SKPD.
- ✓ Perlu penambahan SDM yang memenuhi kualifikasi di bidang statistik.
- ✓ Mengikuti program peltihan - pelatihan terkait pengelolaan data statistik.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan perlunya dukungan pemangku kebijakan untuk mendorong SKPD berperan aktif dalam memberikan data / informasi.

c) Penyusunan Profil Daerah

1) Permasalahan

Masih minimnya SDM terutama di seksi statistik yang memiliki kompetensi di bidang fotografi / infografis, padahal kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

2) Solusi

Perlu penambahan SDM yang memenuhi kualifikasi.

d) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi

1) Permasalahan

- ✓ Pada proses pengadaan menggunakan e-katalog, pelaksanaan kegiatan pengadaan terjadwal sesuai waktu yang telah direncanakan akan tetapi proses administrasi mengalami keterlambatan.
- ✓ Penyedia pengadaan e-katalog menyampaikan barang yang dipesan yaitu anti virus yang diinginkan sesuai spesifikasi tidak tersedia.
- ✓ Pelaksanaan sosialisasi / workshop terkait pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi terjadwal mundur karena penyesuaian jadwal narasumber pusat dan Badan Siber dan Sandi Negara.

2) Solusi

- ✓ Pada saat proses pengadaan e-katalog disarankan untuk segera memproses adminstrasinya bersamaan barang yang telah diorder diterima.
- ✓ Pada pelaksanaan sosialisasi / workshop karena melibatkan pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar kiranya dapat membuat jadwal atau surat permohonan sebagai narasumber terlebih dahulu sebelum jadwal kegiatan dilaksanakan.

e) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian

1) Permasalahan

Pada proses pembahasan dokumen kebijakan belum bisa diterbitkan, karena terkait peraturan turunan dari pusat mengenai keamanan siber belum diterbitkan karena pergantian Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Solusi

Draf Perwali tentang keamanan siber dan keamanan informasi telah disiapkan dan pada tahun anggaran 2020 akan diterbitkan dengan menyesuaikan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu

E. Indikator Kinerja Kunci

1) Tataran Pengambil Kebijakan

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

2) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan tersebut untuk SKPD, dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

3) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan dibuktikan dengan data dukung terlegalisasi atas isian IKK yang disajikan. (format isian IKK terlampir)

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

(Tidak ada Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru)

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

(Tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru)

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kepala Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan operasional kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta peran operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipatif aktif, kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya kondisi masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi SDM yang produktif.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2020 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 92% (Sembilan puluh dua persen) sedangkan capaian fisik sebesar 100% (seratus persen). Adapun kegiatan yang serapan anggarannya terkecil adalah pada kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi sebesar **67,27%** (enam puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen). Sedangkan kegiatan lainnya yang serapan anggarannya di bawah 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik sebesar **69,77%** (enam puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen)

Berdasarkan analisa tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan secara umum sudah mendukung capaian misi renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi misi Walikota Banjarbaru yang ke empat yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi”, maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah berkontribusi dengan maksimal yaitu Penambahan Titik CCTV, Pembuatan Command Center, Pengadaan Pusat Data dan Pemasangan Radio Link Sekolah di Kota Banjarbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru juga telah membentuk dan membina KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di 19 (sembilan belas) Kelurahan di Kota Banjarbaru yaitu Kelurahan Palam, Kelurahan Loktabat

Selatan, Kelurahan Loktabat Utara, Kelurahan Mentaos, Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kelurahan Cempaka, Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Komet dan Kelurahan Kemuning. Serta juga telah dibuat aplikasi Lapor, yaitu penyampaian SMS aduan dari masyarakat yang secara langsung akan ditanggapi oleh SKPD terkait.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya.

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kota Banjarbaru,**

**IWAN HERMAWAN, S.Hut, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710209 199803 1 004**

